



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 20 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP. 197004051997031004



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG**



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 20 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP. 197004051997031004

KATA PENGANTAR

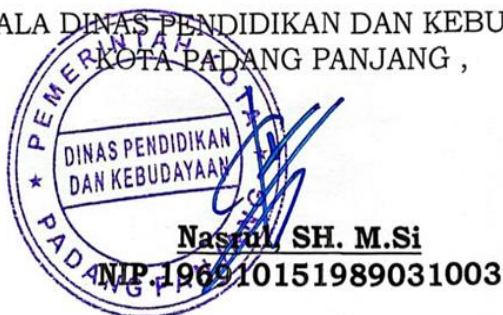
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan kebudayaan Kota padang Panjang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024.

Sebagai sektor penting dalam pembangunan Kota Padang Panjang, maka diperlukan penanganan serius secara terus menerus sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dinas teknis menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan tekad menjadikan padang panjang sebagai kota pendidikan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi rakyat dan didukung dengan berbagai upaya dibidang pendidikan sebagaimana yang termuat dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Padang Panjang.

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan berbagai program masih ditemui adanya permasalahan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ketersediaan sarana pendukung masih terbatas. Sedangkan secara eksternal, kurang terlaksananya program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih disebabkan alasan teknis dan aturan hukum yang menjadi landasan untuk dilaksanakannya suatu kegiatan.

Padang Panjang, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2024-2026.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 sebagai berikut :

❖ Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat” dengan Indikator Tujuannya adalah “Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah” dengan target tahun 2024 sebesar 12.04% dan 15.36%,
2. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat dengan indicator Persentase objek pemajuan kebudayaan, dengan target 74.10% untuk tahun 2024.

❖ Sasaran

Sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat
 - b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat
 - c. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD
 - d. APK PAUD (3-6 tahun)
 - e. APK SD sederajat
 - f. APK SMP sederajat
 - g. Literasi dan Numerasi SD sederajat
 - h. Literasi dan Numerasi SMP sederajat
 - i. Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat
 - j. Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat

2. Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat dengan indicator sebagai berikut:
 - a. Persentase warisan budaya yang dilestarikan
 - b. Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari
 - c. Persentase cagar budaya yang dilestarikan
 - d. Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan
- ❖ Indikator sasaran kinerja Meningkat dan terjaminnya mutu pendidikan secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Indikator sasaran kinerja Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Upaya mencapai Tujuan dan sasaran diatas dilakukan perbaikan sarana prasarana pendidikan sehingga akses pendidikan akan mudah dijangkau yang berdampak terhadap peningkatan mutu dan akses pendidikan kota Padang Panjang. Juga dilakukan kegiatan literasi dan numerasi terhadap siswa yang baru untuk melek membaca dan cakap berhitung. Perncapaian urusan kebudayaan dilakukan pengenalan warisan budaya benda dan tak benda kepada masyarakat kota Padang Panjang melalui kegiatan Galanggang Arang di area Stasiun Kereta Api Padang Panjang.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja disebabkan :

- a. Adanya kesadaran masyarakat Kota Padang Panjang untuk mengakses sekolah yang ada di Kota Padang Panjang.
- b. Daya Tampung sekolah mencukupi untuk akses anak-anak Padang Panjang.
- c. Banyak anak luar Padang Panjang yang sekolah di Padang Panjang.
- d. Adanya kepedulian niniak mamak dan pelaku budaya di Padang panjang.
- e. Adanya gerakan GSMS (gerakan seniman Masuk Sekolah)

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain:

- a. Belum adanya kerjasama dengan Kemenag Kota Padang Panjang mengenai data Pendidikan.

- b. Akses pendidikan masih terpusat di tengah kota
- c. Akses adat dan serta pelaku budaya masih sedikit.
- d. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Upaya mengatasi kendala atau faktor penghambat diatas adalah meningkatkan kembali koordinasi dan saling tukar data antara OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kemenag Kota Padang Panjang, juga perbaikan dan pemerataan akses terhadap sekolah sekolah yang ada dipinggiran kota.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1. Perlu adanya kerjasama dengan kemenag Kota Padang Panjang
- 2. Akses pendidikan untuk kota Padang Panjang.
- 3. Perlu peningkatan akses pelaku budaya di Padang Panjang.
- 4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya

Evaluasi kinerja tahun 2024 ini menjadi landasan untuk target kinerja masa yang akan datang. Kinerja tahun depan harus mempedomani evaluasi dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemajuan pendidikan dan kebudayaan kota Padang Panjang adalah tanggung jawab semua masyarakat yang dilaksanakan pemerintah kota serta unsur dinas pendidikan dan kebudayaan. Tatangan yang harus dihadapi sebagai berikut:

- 1. Perubahan dinamika pendidikan harus segera disikapi oleh daerah
- 2. Perlu dukungan dana untuk pendidikan
- 3. Perlu adanya keterbukaan informasi public.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	1
c. Aspek Strategis Organisasi	11
d. Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11
e. Sumber Daya Manusia	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
a. Tujuan Dan Sasaran	14
b. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
a. Capaian Kinerja Organisasi	23
b. Realisasi Anggaran Tahun 2024	29
 BAB IV PENUTUP	39
a. Kesimpulan	39
b. Rekomendasi	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai pertanggungjawaban urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, maka pelaporan kinerja Instansi Pemerintah, Perlu ditindak lanjuti dengan menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang No. 42 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, Dinas mempunyai susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
4. bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan

5. UPTD

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas;
6. Pengelolaan manajemen bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, kebudayaan dan bidang sarana prasarana pendidikan;
7. Pelaksanaan proses perizinan bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing bidang dan sekretariat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas. Adapun fungsi sekretariat sebagai berikut:

1. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan, bidang sarana dan prasarana pendidikan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;

3. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
4. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;
5. pelaksanaan urusan organisasi, pengelolaan kepegawaian, dan tata laksana;
6. penyusunan bahan pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan dasar, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan dasar, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
7. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
8. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kebudayaan serta bidang sarana dan prasarana pendidikan;
9. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
12. penyelenggaraan pengarahannya pelaksanaan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal;

Bidang pembinaan kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

non formal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Adapun fungsi bidang ini sebagai berikut:

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pelestarian komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
2. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,
3. pelestarian komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
4. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
5. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
6. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
7. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
8. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal;
9. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya;
10. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
11. penyusunan bahan fasilitasi serta pemantauan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian serta tenaga kebudayaan;
12. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
13. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
14. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
15. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;

16. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan,dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
17. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
18. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
19. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

Bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Adapun fungsi bidang ini sebagai berikut:

1. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan dan sarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
2. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
3. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
5. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

6. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
7. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
8. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
9. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
10. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah;
11. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
12. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
13. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

D. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

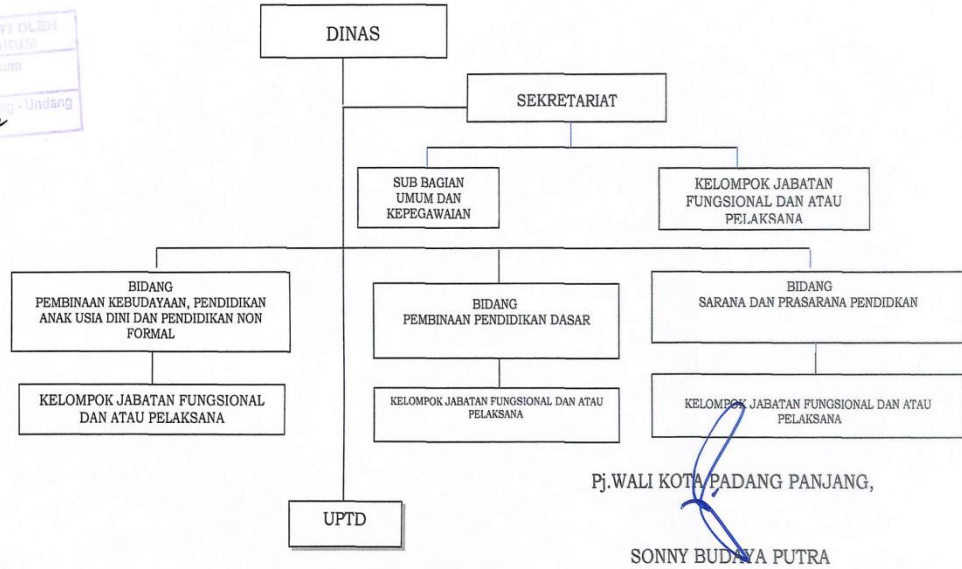
Bidang sarana dan prasarana pendidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun fungsi bidang ini sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
2. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan sarana dan prasarana sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kebudayaan dan pendidikan non formal;
3. penyiapan bahan analisis kebutuhan sarana prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan pendidikan;
4. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
5. menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, serta bidang pembinaan pendidikan dasar termasuk pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
6. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1	Pj. edb	cuwa	
2	Ass 3	Mawls	
3	Widy. Diklat	Telvin Li	

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



C. Sumber Daya Manusia

Sebagai gambaran kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jabatan			Gol				Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Struktural	Fungsional	Pelaksana	IV	III	II	VII	
1	ASN	18	19	6	5	26	9	22	5	1	37
2	Non ASN	12	11	0	0	0	0	0	0	0	23
	JUMLAH	30	30	6	5	26	9	22	5	1	60

Sumber : Disdikbud data keadaan Desember 2024.

2. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	JENJANG	PENDIDIK	TENDIK	JUMLAH
				(Org)
1	PAUD	266	31	297
2	SEKOLAH DASAR	359	166	525
3	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	250	82	332

D. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai pusat kegiatan Kota Padang Panjang mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi, maupun social. Ditambah lagi dengan fungsi Kota Padang Panjang sebagai pusat pendidikan, berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Padang Panjang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan, social budaya di Kota Padang Panjang.

E. Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Padang Panjang antara lain pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), untuk menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan, suatu kondisi atau keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Isu strategis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang diperoleh baik dari analisis internal maupun eksternal yaitu :

- 1) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam layanan pendidikan;
- 2) Peningkatan dan Pemerataan mutu dan relevansi pendidikan;
- 3) Penumbuhan Karakter Melalui layanan pendidikan;
- 4) Tata kelola dan revitalisasi kelembagaan pendidikan;
- 5) Meningkatnya partisipasi melanjutkan pendidikan oleh masyarakat ketingkat pendidikan yang lebih tinggi;
- 6) Peningkatan standarisasi dan infrastruktur pendidikan;
- 7) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah;
- 8) Pemanfaatan revolusi industri 4.0 dengan melakukan literasi teknologi bagi guru, peserta didik dan pendidik;
- 9) Pembiasaan budaya daerah dilingkungan masyarakat dan sekolah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang disusun untuk menjawab pertanyaan; (1) kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh OPD agar tujuan tercapai. Dalam perjalanannya, rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan adanya perubahan terhadap RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 yang disebabkan oleh perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Substansi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang mengalami perubahan meliputi gambaran pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; permasalahan dan isu-isu strategis; tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan; Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk mencapai program dan kegiatan tahun 2024, Tujuan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang Panjang adalah Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan ini didasari pada indikator Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam RPD 2024-2026 perlu dirumuskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2026 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Definisi operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	11.94	11.96	11.98
			Harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang	15.09	15.10	15.11
		Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7-12 di kota Padang panjang	99,6%	99,7%	99,7%
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar disatuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13-15 tahun di kota Padang panjang	97,4%	97,5%	97,5%
			Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	Persentase Peserta didik yang sedang duduk di kelas 1 SD yang pada tahun ajaran sebelumnya mengikuti PAUD terhadap seluruh anak yang sedang duduk dikelas 1 SD	60%	61%	62%

			APK PAUD (3-6 tahun)	Jumlah peserta didik di jenjang PAUD sederajat usia 3-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 3-6 di kota padang panjang	48%	49%	50%
			APK SD sederajat	Jumlah peserta didik jenjang SD sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun di kota Padang Panjang	106,20%	106,10%	106%
			APK SMP sederajat	Jumlah peserta didik jenjang SMP sederajat dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun di kota Padang Panjang	107,5%	107%	107%
			Literasi dan Numerasi SD sederajat	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	89.11 dan 71.56	90.11 dan 72.56	91.11 dan 73.56
			Literasi dan Numerasi SMP sederajat	Persentase Peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) dan	79.30 dan 56.78	80.30 dan 60.25	81.30 dan 61.25

				Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.			
			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.	a.73.91 b.72.41 c.58.13	a.74.91 b.73.41 c.59.13	a.75.91 b.74.41 c.60.13
			Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. b.Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya	a.71.43 b.69.45 c.56.72	a.72.43 b.70.45 c.57.72	a.73.43 b.71.45 c.58.72

				sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. c.Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.			
--	--	--	--	---	--	--	--

2	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat		Persentase objek pemajuan kebudayaan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dibagi jumlah OPK dikali seratus persen	53%	59%	65%
		Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah OPK yang dilestarikan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan	49%	55%	65%

			Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	Jumlah OPK yang dilestarikan dibagi jumlah OPK yang ada di nagari kali seratus persen	60%	65%	70%
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah CB yang dilestarikan dibagi jumlah CB yang ada kali seratus persen	50%	55%	60%
			Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	Jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang berkontribusi/bekerja sama dibagi jumlah kelompok seni/komunitas budaya yang ada kali seratus persen	54%	60%	54%

Terjadinya perubahan target pada perubahan RKPD pada target indikator tujuan rata-rata lama sekolah dari 11.94 menjadi 12.04 terealisasi 12.00. Harapan lama sekolah target 15.09 menjadi 15.36 terealisasi 15.47 Perubahan ini dilakukan untuk mengukur akses pendidikan bagi masyarakat, sehingga kualitas pendidikan makin meningkat. Kualitas Pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi siswa, peningkatan karakter juga menjadi salah satu point penting dalam menghadapi persaingan global.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,6%	99,6%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	97,4%	97,4%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	60%	60%
		APK PAUD (3-6 tahun)	48%	48%
		APK SD sederajat	106,20%	106,20%
		APK SMP sederajat	107,5%	107,5%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	89.11 dan 71.56	89.11 dan 71.56
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	79.30 dan 56.78	79.30 dan 56.78
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.73.91 b.72.41 c.58.13	a.73.91 b.72.41 c.58.13
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.71.43 b.69.45 c.56.72	a.71.43 b.69.45 c.56.72
2	Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	49%	49%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	60%	60%
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	50%
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	54%	54%

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.514.536.345	75.792.669.005
2	Program Pengelolaan Pendidikan	43.760.680.997	44.310.827.929
3	Program Pengembangan Kebudayaan	486.476.000	341.476.000

Perubahan target Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk mengakomodir perubahan pada rapor pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2024. Realisasi dari indikator yang telah ditargetkan akan menentukan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN 1 : Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 10 (empat) indikator kinerja utama, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 1.1
Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Per Sasaran)

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99,6%	99.05%	99.45%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	97,4%	98.53%	101.16%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	60%	62.95%	104.92%
		APK PAUD (3-6 tahun)	48%	42.28%	100%
		APK SD sederajat	106,20%	105.50%	88.08%
		APK SMP sederajat	107,5%	109.31%	101.68%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	89.11 dan 71.56	89.34 dan 78.57	100.25 dan 109.79
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	79.30 dan 56.78	91.09 dan 86.45	114.86 dan 490.86
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	a.73.91	76.37	103.33
			b.72.41	75.38	104.10
			c.58.13	60.71	104.44
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	a.71.43	73.15	102.41
			b.69.45	74.71	107.57
			c.56.72	60.82	107.23

Pencapaian indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pencapaian Indikator kinerja seperti pada tabel diatas menunjukkan adanya kinerja bidang pendidikan untuk kota Padang Panjang sesuai dengan Rapor Pendidikan yang di keluarkan oleh Kemendikdasmen RI.

Untuk tahun 2024 Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan dengan 10 indicator kinerja secara umum telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada APK SD dengan target 106.20% realisasi indikator kinerja ini adalah sebesar 105.50% dengan persentase capaian adalah 88.08 %. Terjadinya penurunan realisasi ini akibat akses pendidikan di tingkat SD masih berpusat di sekolah di pusat kota. Pencapaian tahun ini belum memenuhi target karena adanya siswa yang bersekolah di sekolah Keagamaan yang belum terdata secara rinci. Untuk peserta didik baru tingkat SD se kota Padang Panjang yang meliputi sekolah SD negeri dan sekolah SD swasta. PPDB pada tingkatan SD berdasarkan Perwako no 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Padang Panjang. Pada pasal 21 ayat 1 dijelaskan *"Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah"*.

Dengan adanya zonasi ini, berakibat terhadap akses pendidikan di kota Padang Panjang dapat terjangkau dan Domisili yang dimaksud pada pasal diatas adalah Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Secara umum Hambatan / masalah yang mempengaruhi pencapaian sasaran 1 adalah karena adanya regulasi yang berakibat penurunan Akses partisipasi sekolah SD maupun SMP bagi penduduk yang berada diluar atau tidak ber-KTP Kota Padang Panjang.

Tabel 2.1

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkat dan terjaminnya mutu pendidikan	APK SD/MI/Paket A	114.91%	105.45%	91.77	104.86%	104.86%	100.00	-	-	-
		APM SD/MI/Paket A	99.41%	99.03%	99.62	96.61%	96.61%	100.00	-	-	-
		APK SMP/MTS/Paket B	104.90%	95.06%	90.62	101.57%	107.25%	105.59	-	-	-
		APM SMP/MTS/Paket B	85.07%	79.26%	93.17	86.07%	85.66%	99.52	-	-	-
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	-	-	-	-	-	-	99,6%	99.05%	99.45%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	97,4%	98.53%	101.16%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	-	-	-	-	-	-	60%	62.95%	104.92%
		APK PAUD (3-6 tahun)	-	-	-	-	-	-	48%	42.28%	100%
		APK SD sederajat	-	-	-	-	-	-	106,20%	105.50%	88.08%
		APK SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	107,5%	109.31%	101.68%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	-	-	-	-	-	-	89.11 dan 71.56	89.34 dan 78.57	100.25 dan 109.79
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	79.30 dan 56.78	91.09 dan 86.45	114.86 dan 490.86
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	-	-	-	-	-	-	a.73.91	76.37	103.33
			-	-	-	-	-	-	b.72.41	75.38	104.10
			-	-	-	-	-	-	c.58.13	60.71	104.44
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	-	-	-	-	-	-	a.71.43	73.15	102.41
			-	-	-	-	-	-	b.69.45	74.71	107.57
			-	-	-	-	-	-	c.56.72	60.82	107.23

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2022 APK dan APM SD/MI/Paket A belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2023 terjadi peningkatan capaian menjadi 100 %. Peningkatan capaian ini terjadi karena akses pendidikan di kota Padang Panjang semakin membaik, warga di luar kota banyak yang bersekolah di Padang Panjang. Disamping itu sekolah agama di padang panjang banyak memberikan kontribusi terhadap akses pendidikan.

Terjadinya perubahan target pada indicator pada tahun 2024 diatas dari tahun lalu telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan target diatas mengakomodir rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi RI.

SASARAN 2. Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan aktivitas adat dan budaya di masyarakat dengan 1 indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja dengan predikat Memuaskan.

Tabel 1.2

Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (Per Sasaran)

No	Sasaran	Indikaator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
1	Peningkatan aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	49%	49%	100
2		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	60%	60%	100
3		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50%	50%	100
4		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	54%	54%	100

Pencapaian target 100% ini menjadi tonggak sejarah kebudayaan di Kota Padang Panjang yaitu dengan adanya Keputusan Walikota Padang Panjang nomor 97 tahun 2024 tentang Cagar Budaya Kota Padang Panjang.

Tabel 2.2

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Mendorong peningkatan aktifitas adat dan budaya	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang.	250 orang	458 orang	183.20	460 orang	720 orang	156.52	-	-	-
	Peningkatan aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	49%	49%	100
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	-	-	-	-	-	-	60%	60%	100
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	-	-	50%	50%	100
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	-	-	-	-	-	-	54%	54%	100

Terjadi perubahan indikator pada tahun 2024 menyesuaikan dengan renstra 2024-2026 sebagai renstra transisi kepemimpinan Walikota sampai terpilihnya walikota hasil pemilu serentak tahun 2024.

Tabel 3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Periode akhir Renstra)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99.05%	99.70
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.53%	97.50
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	62.95%	62.00
		APK PAUD (3-6 tahun)	42.28%	50.00
		APK SD sederajat	105.50%	106.00
		APK SMP sederajat	109.31%	107.00
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	89.34 dan 78.57	91.11 dan 73.56
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.09 dan 86.45	81.30 dan 61.25
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	76.37	75.91
			75.38	74.41
			60.71	60.13
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	73.15	73.43
			74.71	71.45
			60.82	58.72
2	Peningkatan aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	49%	65.00
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	60%	70.00
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%	60.00
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	54%	54.00

Dari tabel diatas realisasi tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan pada akhir renstra perangkat daerah. Pencapaian Indikator kinerja seperti pada tabel diatas menunjukkan adanya kinerja bidang pendidikan untuk kota Padang Panjang sesuai dengan Rapor Pendidikan yang di keluarkan oleh Kemendikdasmen RI. Pencapaian indikator kinerja sasaran ini, didukung oleh factor sebagai berikut :

1. Adanya Gerakan Seniman Masuk Sekolah yang di ikuti oleh siswa siswi SD dan SMP Kota Padang Panjang yang dibina oleh Tim ISI Padang Panjang.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Bundo Kandung KAN Gunung, KAN Bukit Surungan dan KAN Lareh nan Panjang Kota Padang Panjang
3. Pelatihan Pasambahan Manyerak Barek Kuyik diikuti oleh 3 KAN
4. Pemangku adat Masuk Sekolah yang mengenalkan adat ABS-SBK.
5. Adanya Lomba Membuat Gambar Bercerita Cagar Budaya di Kota Padang Panjang.

B. 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan.

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah untuk urusan pendidikan, pencapaian ini berdasarkan kerja keras semua pihak yang mengampu pendidikan baik pemerintah maupun masyarakat. Pencapaian ini dilakukan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Uraian Kegiatan	SD	SMP	PAUD	SKB	JUMLAH
Ruang Kelas	13	5	1	3	22
Ruang Perpustakaan	1	1	0	0	2
UKS	1	1	0	0	2
Toilet	0	1	0	0	1
Ruang Guru	1	1	0	0	2
Laboratorium Komputer	2	1	0	0	3

Disamping keberhasilan pendidikan ada juga faktor yang perlu dibenahi. Faktor penghambat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Pengelolaan pendidikan di kota Padang Panjang terkendala oleh birokrasi yang masih panjang.
2. Dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan masih terbatas

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dengan kemenag Kota Padang Panjang
2. Akses pendidikan untuk kota Padang Panjang.
3. Perlu peningkatan akses pelaku budaya di Padang Panjang.
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya

2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Pendidikan di Kota Padang Panjang, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- 1) Sumber Daya Manusia yang kompeten
- 2) Sumber Dana yang mencukupi
- 3) Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel Analisa Sumber Daya

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
2	Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan.	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3	Tercukupinya sarana prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang mendukung	Kekurangan jumlah sarana dan prasarana sekolah	Pengadaan sarana prasarana perlu jadi prioritas

Efisiensi sumber daya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dilaksanakan sebagai wujud komitmen terhadap pendidikan di kota Padang Panjang. Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan, maka dapat dikatakan semakin efisien. Efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pemanfaatan sumber daya Manusia Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pemanfaatan sarana prasarana pendidikan yang telah dibangun dengan dana alokasi umum yang ditentukan (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk peningkatan kompetensi PTK banyak dibantu oleh UPT Kemendikbudristek diantaranya BBPMP sumbar di Padang dan BGP sumbar di Pariaman. Bentuk kegiatannya adalah pelatihan kelmbangaan bagi sekolah, pengawas, pengelola dana BOS, operator Dapodik serta persiapan guru penggerak yang merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi pengawas dan Kepala Sekolah.

Dibidang perencanaan adanya rapor pendidikan sangat membatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perencanaan yang akan datang. Pembiayaan yang dialokasikan untuk dinas pendidikan dan kebudayaan sebenarnya belum memadai untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah, tetapi atas bantuan semua pihak pembiayaan yang ada bisa meningkatkan pembinaan mutu pendidikan di Padang Panjang.

3. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian.

Evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024 ini menjadi landasan untuk target kinerja masa yang akan datang. Kinerja tahun depan harus mempedomani evaluasi dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemajuan pendidikan dan kebudayaan kota Padang Panjang adalah tanggung jawab semua masyarakat, yang dilaksanakan pemerintah kota dan unsur dinas pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilan Program Pengelolaan Pendidikan dengan 4 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pada kegiatan diatas tercapainya Angka Partisipasi sekolah yang menunjang SPM bidang Pendidikan. Angka partisipasi sekolah, akses sekolah bisa ditingkatkan dengan perbaikan sarana prasarana pendidikan. Disamping keberhasilan pendidikan terdapat tatangan yang harus dihadapi sebagai berikut:

- a. Perubahan dinamika pendidikan harus segera disikapi oleh daerah
- b. Perlu dukungan dana untuk pendidikan
- c. Perlu adanya keterbukaan informasi public.

Pencapaian program dan kegiatan serta sub kegiatan terlihat pada tabel dibawah ini.

N o	OPD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran sesuai PK Perubahan	Anggaran LRA	Realisasi sesuai LRA
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.444.972.934,	120,851,718,828	115,116,091,620
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	75.792.669.005	77,336,003,249	76,353,339,173
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	73.563.273.905	75,183,371,653	74,335,947,072
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.563.273.905	75,183,371,653	74,335,947,072
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	496.641.100	485,825,200	419,595,702
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.675.900	15,675,900	13,387,600
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.044.400	122,677,500	116,603,900
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.915.800	33,663,800	31,363,100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.005.000	313,808,000	258,241,102
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.987.000	304,480,500	293,970,000
		Pengadaan Mebel	259.077.500	259,077,500	252,970,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.909.500	45,403,000	41,000,000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.019.772.000	987,620,896	979,078,449

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	5,751,200	5,750,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	150.000.000	105,085,696	100,253,033
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	863.272.000	876,784,000	873,075,416
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.995.000	374,705,000	324,747,950
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.715.000	197,065,000	153,118,950
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.770.000	31,130,000	25,144,000
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	146.510.000	146,510,000	146,485,000
		Program Pengelolaan Pendidikan	44.310.827.929	43,515,715,579	38,762,752,447
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.904.423.464	20,516,004,614	18,136,948,971
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	639.678.400	639,678,400	492,771,523
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	193.172.80	193,172,800	187,718,582
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	193.172.800	193,172,800	189,250,668
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.702.515.087	3,702,515,087	3,010,499,630
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	306.430.000	306,430,000	239,574,500
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	144.950.000,	144,950,000	135,582,750
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	193.100.000	193,100,000	189,337,200
		Pengadaan Mebel Sekolah	728.635.400	728,635,400	700,245,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	561.195.000	561,195,000	525,281,300
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	771.900.000	771,900,000	679,597,001
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	105.565.000	105,565,000	99,000,000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	389.724.000	389,373,900	285,692,040
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi	3.054.213.600	2,704,489,200	2,690,378,321

		Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	488.821.700	457,013,700	365,360,225
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	63.621.950,	63,621,950	48,339,840
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.712.600.000	5,712,600,000	5,584,323,241
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.200.000	35,200,000	28,200,000
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	815.005.595	815,005,595	634,234,678
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	-	-	-
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	327.676.950	327,119,000	237,754,755
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	181.735.800	175,757,400	173,232,150
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.400.000.000	1,400,000,000	1,069,721,527
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	651.169.482	651,169,482	340,206,470
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	51.239.900,	51,239,900	41,060,900
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	193.100.000	193,100,000	189,586,671
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.389.006.615	14,144,773,915	12,275,373,440
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	800,000,000	639,630,135
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	241.920.230	241,920,230	187,852,660
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.085.098.235	1,085,098,235	887,339,263
		Pembangunan Laboratorium	300.000.000	300,000,000	232,582,693
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.515.945.000	1,515,945,000	1,177,039,220
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.085.185.000	1,085,185,000	870,875,642
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	-

		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000	300,000,000	229,682,043
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	214.678.790	214,678,790	160,294,847
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	277.472.710	277,472,710	252,181,964
		Pengadaan Mebel Sekolah	559.765.429,	559,765,429	539,606,100
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	579.155.171	579,155,171	578,720,000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	290.000.000	290,000,000	179,353,875
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	76.500.000	72,500,000	72,500,000
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	65.000.000	65,000,000	59,295,300
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	207.067.000	207,067,000	183,913,303
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	496.330.000	495,105,500	342,460,185
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.480.632.800	1,276,620,000	1,264,749,550
		Pengembangan Karir Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	396.078.000	393,165,600	265,026,575
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	35.325.700	34,725,700	29,107,260
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3.801.900.000	3,801,900,000	3,666,714,331
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.999.800	27,999,800	21,210,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000	18,750,000	14,985,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	24.999.000	16,080,000	12,976,200
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	205.953.750	186,639,750	183,802,350
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000	300,000,000	223,474,942
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.069.558.150	6,918,378,150	6,656,276,348

		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	362.744.000	362,744,000	353,906,860
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas / Ruang Guru PAUD	50.000.000,	50,000,000	45,941,123
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	292.140.000	292,140,000	139,045,877
		Pengadaan Mebel PAUD	28.829.600	28,829,600	27,820,000
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	53.600.000,	53,600,000	35,000,000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	194.812.000	194,812,000	189,365,020
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	90.967.400,	88,437,400	86,957,405
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	4.021.200.000,	3,886,100,000	3,885,950,000
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	372.409.950	371,009,950	344,598,000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	93.619.200	85,299,200	72,504,346
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.439.400.000,	1,439,400,000	1,416,553,767
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	20.000.000	17,010,000	16,718,100
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000,	29,160,000	22,079,850
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	19.836.000	19,836,000	19,836,000
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.947.839.700	1,936,558,900	1,694,153,688
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	188.206.650,	188,206,650	182,728,965
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	140.557.800	140,557,800	120,379,215
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.499.750	49,499,750	27,434,813
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.999.750	19,999,750	11,281,750

		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	581.100.000	581,100,000	570,333,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	14.999.800	3,719,000	3,649,700
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	20.000.000	20,000,000	19,992,000
		Rehabilitas Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000	50,000,000	48,209,535
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	169.888.750	169,888,750	126,095,225
		Pengadaan Mebel Sekolah	50.000.000	50,000,000	40,975,600
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	80.000.000,	80,000,000	77,246,830
		Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	583.587.200	583,587,200	465,827,055
		Program Pengembangan Kebudayaan	341.476.000,	341,476,000	333,466,995
		Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota	252,296,000	252,296,000	247,357,820
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	252,296,000	252,296,000	247,357,820
		Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	76,700,000	76,700,000	73,629,175
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	46,700,000	46,700,000	43,852,175
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	30,000,000	30,000,000	29,777,000
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	12,480,000	12,480,000	12,480,000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	12,480,000	12,480,000	12,480,000
		JUMLAH BELANJA	120.444.972.934	121,193,194,828	115,449,558,615

Dari tabel diatas tergambar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 mendapat alokasi anggaran di DPA Perubahan sebesar Rp. 121.193.194.828 dengan realisasi sebesar Rp. 115.449.558.615. atau sebesar 95.26%. (Kondisi TMT 31 Desember 2024). Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024 diakibatkan adanya pegerasan kegiatan yang yang substansial untuk pemenuhan belanja pegawai yang belum mencukupi 12 bulan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang mendapat alokasi anggaran di DPA Perubahan sebesar Rp. 102.378.828.647 dengan realisasi sebesar Rp. 97.732.440.933. atau sebesar 95%. (Kondisi TMT 31 Desember 2023). Terjadi kenaikan persentase realiasi untuk tahun 2024, sebagai keberhasilan urusan pendidikan di kota Padang Panjang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan Sekolah yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang. Dengan demikian laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPT secara keseluruhan. Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 merupakan pengukuran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Hasil capai kenerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatkan akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	99.05%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	98.53%
		Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	62.95%
		APK PAUD (3-6 tahun)	42.28%
		APK SD sederajat	105.50%
		APK SMP sederajat	109.31%
		Literasi dan Numerasi SD sederajat	89.34 dan 78.57
		Literasi dan Numerasi SMP sederajat	91.09 dan 86.45
		Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	76.37
			75.38
			60.71
2	Peningkatan aktifitas adat dan budaya di masyarakat	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	73.15
			74.71
			60.82
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	49%
		Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	60%
		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	50%
		Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	54%

B. Permasalahan dan kendala Utama

Disamping keberhasilan pendidikan ada juga faktor yang perlu dibenahi. Kendala Utama kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1. Pengelolaan pendidikan di kota Padang Panjang terkendala oleh birokrasi yang masih panjang.
2. Dukungan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan masih terbatas
3. Terbatasnya SDM Kebudayaan .

C. Strategi Pemecahan Masalah.

Strategi pemecahan masalah dari kendala utama yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perlunya kehadiran Pemerintah kota yang mendukung langkah perbaikan layanan yang bisa diakses semua sektor yang membutuhkan Layanan pendidikan. Dukungan anggaran sangat perlu dari komisi III dan Banggar DPRD kota Padang Panjang sebagai mitra pemerintah daerah. Untuk pemenuhan SDM Kebudayaan perlu adanya kolaborasi dengan perguruan tinggi seni yang ada di Padang Panjang.

D. Rekomendasi

Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilakukan antara lain :

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih baik dan antisipasif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Peningkatan kompetensi SDM meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dengan Dinas terkait baik tingkat Kota, Propinsi maupun Pusat.